PERANAN PEMBELAJARAN PPKN DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DI SMA NEGERI 1 ULUBELU TAHUN PELAJARAN 2017/2018

(Skripsi)

Oleh MERI SARTIKA



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018

ABSTRAK

PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI

Oleh:

Meri Sartika

Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan peranan pembelajaran PPKn dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian dua Guru PPKn, lima peserta didik diambil berdasarkan tingkatan nilai (rendah, sedang, tinggi) dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran PPKn dalam proses transformasi nilai adalah menyampaikan nilai-nilai demokrasi, transaksi nilai adalah menciptakan hubungan timbal balik, internalisasi nilai adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik. Peserta didik dapat mengerti, memahami dan mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam kepribadian dirinya. Pihak sekolah mendukung dengan berbagai kegiatan ekstrakulikuler yang mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Kata kunci :Pembelajaran PPKn, Internalisasi, Nilai-Nilai Demokrasi

PERANAN PEMBELAJARAN PPKN DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DI SMA NEGERI 1 ULUBELU TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Oleh

MERI SARTIKA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIKAN Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018 Judul Skripsi

: PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM

MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DI SMA NEGERI 1 ULUBELU TAHUN PELAJARAN

2017/2018

Nama Mahasiswa

: Meri Sartika

No. Pokok Mahasiswa

: 1413032040

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Irawan Suntoro, M.S. NIP 19560323 198403 1 003

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. NIP 19820727 200604 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.

NIP 19600111 198703 1 00

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Irawan Suntoro, M.S.

Sekretaris : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

Penguji Bukan Pembimbing: **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, W. Hum.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

Nama : Meri Sartika NPM : 1413032040

Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Jl. Bumi Manti I Gg. Pandan 1 No. 42 Kampung Baru,

Kedaton, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

18005ADF761972362

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis

Meri Sartika

NPM 1413032040

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 14 Maret 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan bapak Suhirman (Alm) dengan Ibu Sri Herlinda.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Assalam pada

tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 2 Kampung Baru pada tahun 2008, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ulubelu pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Djogjakarta-Bandung-Jakarta pada bulan Januari 2015 serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Padang Dalom Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang terintegrasi dengan Program Pengalaman (PPK) di SMP Negeri 1 Liwa bulan Juli-September 2017.

MOTO

"Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu"

(Q.S. Al-Hujurat: 13)

"Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika aku menginginkannya" (Anni Gottlier)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tuaku, Mama Ayah yang sangat kucintai, kusayangi dan kubanggakan, terimakasih atas kasih sayang, do'a, dukungan dan semangat serta pengorbanan demi keberhasilanku.

Kepada seluruh rakyat Indonesia dan Pemerintah yang telah membiayai kuliahku sampai semester delapan melalui program Bidik Misi. Semoga dengan ilmu ini, aku dapat mengemban amanah untuk mengabdi pada Negeri tercinta.

Keluarga besarku dan teman-teman yang terus memberikan dukungan dan do'a serta semangat menanti keberhasilanku

Seluruh Dosen yang telah sabar membimbing dan mengarahkan aku hingga berhasil menyelesaikan studi

Almamater tercinta, PPKn FKIP Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERANAN PEMBELAJARAN PPKN DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DI SMA NEGERI 1 ULUBELU TAHUN PELAJARAN 2017/2018". Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas segala bantuan baik berupa pemikiran, fasilitas, motivasi dan lain lain demi terselesaikannya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir terutama kepada Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku ketua program studi PPKn serta pembimbing II, serta ucapan terimakasih kepada:

- Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kerja Sama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

- 4. Bapak Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- 6. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya;
- 7. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II, terima kasih atas saran dan masukannya;
- 8. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan;
- Kak Muklas, Mbak Elisa, Mbak Devita dan Kak Takim yang telah banyak membantu dalam segala urusan di program studi, terima kasih atas ilmu yang diberikan serta bantuan dan dukungan yang diberikan;
- 10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bpk. Suhirman dan Ibu Sri Herlinda serta adik-adikku tercinta (Uut dan Yolanda) dan Kakek dan Nenek baik yang di Ulubelu maupun yang di Ranau, seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku tercinta terimaksih atas doa, senyum, semangat,

- airmata, bahagia, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tiada terkira nilainya;
- 11. Seluruh Bapak dan Ibu Guruku terimakasih atas segala yang telah kalian ajarkan kepadaku, semoga kelak aku bisa menjadi seperti kalian;
- 12. Sahabat-sahabat terbaikku dari dulu hingga sekarang (Heni, Nova, Eni, Riska, Meidia, Jepi, dan Yeti) dan sahabat yang selalu menemani aku dimasa-masa sulitku (Inka, Nining, Anggun alias Dian Ayu) dan seseorang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta keluargaku tercinta semasa KKN (Wili, Fatyn, Mami, Lucky, Irma, Visa, Winda, Papi dan Dewa) dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, masukan dan pencerahan dikala gundah;
- 13. Teman-teman seperjuanganku PPKn angkatan 2014 baik ganjil maupun genap terimakasih atas segala dukungan, suka dan duka selama perkuliahan sampai semester 8 kita lalui bersama, semoga selalu terkenang selamalamanya. Serta kakak tingkat dan adek tingkat, dari angkatan 2011-2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan yang kalian berikan;
- 14. Teman-teman seperjuangan di Kecamatan Balik Bukit, terima kasih atas segala kebahagiaan yang kalian berikan selama hidup bersama selama kurang lebih 50 hari.
- 15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Mei 2018 Penulis

Meri Sartika NPM 1413032040

DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAKi
HALAMAN JUDULii
HALAMAN PERSETUJUANiii
HALAMAN PENGESAHANiv
SURAT PERNYATAANv
RIWAYAT HIDUPvi
PERSEMBAHANvii
MOTOviii
SANWACANAix
DAFTAR ISIxiii
DAFTAR TABELxvi
DAFTAR GAMBARxvii
DAFTAR LAMPIRANxviii
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Fokus Penelitian
C. Perumusan Masalah
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Secara Teoritis13
b. Kegunaan Secara Praktis
E. Ruang Lingkup Penelitian14
1. Ruang Lingkup Ilmu14
2. Ruang Lingkup Objek14
3. Ruang Lingkup Subjek14
4. Ruang Lingkup Tempat14
5. Ruang Lingkup Waktu15
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teori
1. Tinjuan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan16
a. Pengertian PPKn
b. Fungsi PPKn21
c Tujuan PPKn 24

d. Pentingnya Peran PPKn	26
2. Tinjauan tentang Internalisasi	
a.Pengertian Internalisasi	
b. Tahapan Internalisasi	
c. Teori Internalisasi	30
d. Tujuan Internalisasi	31
3. Tinjauan tentang Nilai-Nilai Demokrasi	32
a.Nilai-Nilai Demokrasi	
C. Penelitian yang Relevan	39
D. Kerangka Pikir	
HI MERODE BENEVIROLAN	
III. METODE PENELITIAN	12
A. Jenis Penelitan	
B. Lokasi Penelitian	
C. Kehadiran Peneliti	
D. Data dan Sumber Data	
1. Data	
2. Sumber Data	
E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Observasi	
Wawancara Dokumentasi	
F. Uji Kredibilitas DataG. Teknik Pengolahan Data	
H. Teknik Analisis Data	
1. Pengumpulan Data	
2. Reduksi Data	
3. Penyajian Data	
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan	
I. Rencana Penelitian	
J. Tahapan Penelitian	
1. Pengajuan Judul	
Penelitian Pendahuluan	
Pengajuan Rencana Penelitian	
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian	53 54
5. Pelaksanaan Penelitian	54 55
3. 1 Clarsallaali i Cheffiali	
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Profil SMA Negeri 1 Ulubelu	
2. Luas Wilayah dan Prasarana Sekolah	
3. Kondisi Peserta Didik	
B. Deskripsi Hasil Penelitian	61
1. Paparan Data	

a. Peranan Pembelajaran PPKn dalam transformasi nilai-nilai	
Demokrasi6	51
b. Peranan Pembelajaran PPKn dalam transaksi nilai-nilai	
Demokrasi6	57
c. Peranan Pembelajaran PPKn dalam internalisasi nilai-nilai	
Demokrasi	72
2. Temuan Penelitian	30
C. Pembahasan Hasil Penelitian.	35
1. Peranan Pembelajaran PPKn dalam Transformasi nilai-nilai	
demokrasi	37
2. Peranan Pembelajaran PPKn dalam Transaksi nilai-nilai	
demokrasi9) ()
3. Peranan Pembelajaran PPKn dalam Internalisasi nilai-nilai	
demokrasi) 3
D. Keunikan Hasil Penelitian9) 9
I. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan10)1
B. Saran 10)2
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Hasil Belajar PKn pada materi Budaya Demokrasi di kelas IX IPA	9
3.1 Data dan Sumber Data Penelitian	46
3.2Teknik Pengumpulan Data Penelitian	47
4.1 Jadwal Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	56
4.2 Profil SMA Negeri 1 Ulubelu	57
4.3 Data Jumlah Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Ulubelu	57
4.4 Prasarana SMA Negeri 1 Ulubelu	58
4.5 Jumlah Peserta Didik SMA Negeri 1 Ulubelu	60
4.6 Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn SMA Negeri 1 Ulubelu Tahun Pe	lajaran
2017/2018	60
4.7 Tabel Temuan Penelitian	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	42
3.1 Triangulasi Data menurut Denzi	49
3.2Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman	51
3.3Rencana Penelitian	52
4.1Halaman dan lapangan upacara SMA Negeri 1 Ulubelu	58
4.2 Jumlah Guru di SMA Negeri 1 Ulubelu	65
4.3 Proses Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Ulubelu	66
4.4 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ulubelu	67

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Rencana Pengajuan Judul dan CalonPembimbing
- 2. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP Unila
- 3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
- 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
- 5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
- 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal
- 7. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
- 8. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
- 9. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
- 10. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
- 11. Surat Rekomendasi Perbaikan
- 12. Surat Izin Penelitian
- 13. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- 14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
- 15. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil
- 16. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas
- 17. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing II
- 18. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing I
- 19. Surat Rekomendasi Perbaikan
- 20. Kisi-Kisi Wawancara
- 21. Kisi-Kisi Observasi
- 22. Kisi-Kisi Dokumentasi
- 23. Instrument Wawancara
- 24. Instrument Observasi
- 25. Instrument Dokumentasi
- 26. Jadwal Penelitian
- 27. Uji Kredibilitas
- 28. Lampiran Gambar
- 29. Lampiran Hasil Wawancara

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hakekat pendidikan sebagai upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dalam negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan dengan dinamika perubahannya. Untuk menjawab hal tersebut dibutuhkan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa yang dapat menjadi pedoman hidup warga negara. Setiap negara manapun menginginkan negara dan bangsanya tetap berdiri tegak, mandiri, kuat sekaligus mampu memberi pengaruh bagi bangsa dan negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut berbagai upaya dilakukan dalam rangka pembangunan segala aspek, dan yang lebih utama pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berbagai program tentang pendidikan telah digulirkan seperti program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Pendidikan Karakter, Gerakan Nasional Wajib Belajar Sembilan tahun dan lain-lain. Pola pendidikan di Indonesia telah di atur secara sistematis dan terstruktur mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terdapat tingkat program belajar yang terhimpun dalam mata pelajaran.

Masing-masing mata pelajaran memiliki fokus dan tujuan tersendiri yang kesemuanya diarahkan pada upaya pencapaian tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan secara khusus tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar men-jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber-akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mata pelajaran PPKn merupakan pendidikan yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan termasuk jenjang perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang baru No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan.

Peranan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam rangka menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku

yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional.Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.Pendidikan Kewarganegaraan membentuk warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam hal ini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai misi pada penyiapan peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya semata-mata untuk pengetahuan (intelektual), melainkan realisasi sikap dan perilaku nyata sehari-hari sesuai dengan hakekat dan potensi diri masing-masing yang bersifat utuh. Sebagaimana yang diungkapkan Nursid Sumattmadja (2001:15) yang menjelaskan bahwa " keutuhan manusia itu bukan hanya pada sosok jasmaninya seperti makhluk hidup lainnya melainkan meliputi juga aspek akhlak, moral dan tanggung jawab sebagai khalifah dimuka bumi disinilah letak keterpaduan antara pendidikan intelektual dengan keterampilan dan pendidikan umum".

Civic Education oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan. Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE (Indonesian

Center for Civic Education) UIN Jakarta, yang merupakan penggagas pertama setelah lengsernya Orde Baru. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Somantri, dan Udin S. Winataputra. Sebagian ahli menyamakan civic education dengan Pendidikan Demokrasi (Democracy Education) dan Pendidikan HAM. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan guru sebagai tenaga kependidikan dan peserta didik dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal lain yang menjadi titik tekan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga duania (global society).

Menurut Azyumardi Azra (2001: 5) bahwa Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, yakni (a) pengetahuan tentang pemerintahan, konstitusi, lembagalembaga demokrasi, *Rule of Law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani, (b) pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, dan (c) pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, pendidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan

keselarasan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Pandangan Zamroni (2013:8) tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, dan kesadaran bahwa demokrasi merupakan bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.Pendidikan Demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilainilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara.

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis melalui pengembangan dan pembiasaan dalam kehidupan warga sehingga menjadi budaya demokrasi. Muhaimin (2002:11), memberikan penjelasan bahwa nilai yang penting dalam demokrasi seperti : kemauan melakukan kompromi, bermusyawarah berdasar asas saling menghargai dan ketundukan kepada rule of law yang pada akhirnya akan menjamin terlindungnya hak asasi tiap-tiap manusia Indonesia. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasi-kan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nurcholish Madjid Dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya tujuh norma atau pandangan hidup demokratis sebagai berikut : kesadaran akan pluralisme, prinsip musyawarah, adanya pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan adil, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga, serta pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilainilai demokrasi sesuai dengan status dan peranannya di masyarakat (Winataputra 2012:71). Tujuan dari pendidikan demokrasi untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasi-kan nilai-nilai demokrasi tergantung pada masyarakat.Pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis, manusia yang me-megang teguh nilai-nilai demokrasi, tanpa hal tersebut maka masyarakat demokratis hanya impian belaka.

Indonesia telah memiliki pengalaman yang kaya akan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winataputramenyatakan bahwa sejak tahun 1945 hingga sekarang instrument perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagian bagian integral dari pendidikan nasional. Misalnya dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa "Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga

negara yang mempunyai rasa tanggung jawab", yang kemudian oleh Kementerian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan:"...untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat." Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa semua ide yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi dan HAM. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku sampai saat ini pendidikan bertujuan menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi.

Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan dikatakan sebagai pendidikan yang mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi. Tuntutan akan hal demikian tidak salah karena secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan Miriam Budiardjo tahun 1977 dalam (Winarno 2013:134), menurut International Commission of Jurist sebagai organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintaham yang demokratis di bawah Rule of Law ialah:

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
- c. Pemilihan umum yang bebas,
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat,
- e. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi, dan
- f. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Hal penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler, apakah dimuat secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran , ataukah disisipkan ke dalam mata pelajaran umum. Merujuk pada prinsip-prinsip pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, maka pendidikan kewarganegaraan memegang posisi penting guna membangun kultur Negara yang demokratis. Sedangkan masalah isi materi dari pendidikan demokrasi perlu ditekankan pada empat hal, yaitu asas-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi; sejarah demokrasi di Indonesia; jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945; dan masa depan demokrasi.

Sebagai salah satu negara yang sejak awal berdirinya telah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya Indonesia telah mengalami pasang surut demokrasi sesuai dengan konteks zamannya. Sistem politik demokrasi ini merupakan sistem yang dianggap paling tepat diberlakukan karena sesuai dengan sejarah, karakteristik, pola perilaku dan cita-cita bangsa Indonesia. Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilainilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik sekaligus sebagai sikap hidup. Oleh karena itu, subtansi berdimensi jangka panjang guna mewujudkan masyarakat demokratis pendidikan demokrasi mutlak diperlukan (Winarno, 2013:113). Seperti yang kita ketahui bahwa

membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi. Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi, dengan adanya lembaga-lembaga politik demokrasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Ulubelu Tanggamus diperoleh data hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PKn di kelas XI IPA 1 berjumlah 29 orang dan XI IPA 2 berjumlah 27 orang maka keseluruhan jumlahnya yaitu 56 orang.

Tabel 1.1 Hasil Belajar Pkn di kelas XI IPA

No.	Nilai	Kelas		Jumlah	KKM	Keterangan
		XI IPA 1	XI IPA 2			
1.	78-80	5	10	15 orang	77	Mencapai KKM
2.	81-83	14	11	25 orang	77	Mencapai KKM
3.	84-86	10	6	16 orang	77	Mencapai KKM

Sumber: Guru PPKn kelas XI IPA SMA Negeri 1 Ulubelu

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hasil belajar kelas XI IPA tergolong cukup baik karena keseluruhan peserta didik dapat mencapai KKM.Jika dilihat dari ketercapaian materi budaya demokrasi hampir semua peserta didik mencapai kkm. Proses pembelajaran yang melibatkan guru sebagai tenaga kependidikan serta kesiapan peserta didik dalam belajar sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran.Dengan diberikannya pembelajaran mengenai budaya demokrasi serta melibatkan langsung peserta didik dalam kegiatan berdemokrasi dapat menumbuhkan wawasan sehingga dapat dilakukan sebagai suatu kebiasaan dan menjadi sebuah karakter pada diri

peserta didik.Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh peserta didik tersebut menjadi acuan bagi terbentuknya sikap demokratis peserta di lingkungan masyarakat.

Lingkungan SMA Negeri 1 Ulubelu terletak di Kecamatan Ulubelu yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.Sekolah ini merupakan sekolah menengah atas negeri yang pertama berada di kecamatan ulubelu.Lokasinya terletak diantara perkebunan warga sekitar yang terdiri dari perkebunan kopi dan lada.Jarak sekolah dengan pemukiman warga dipisahkan oleh kebun-kebun tersebut.Dengan keadaan yang demikian tidak mengurangi semangat para peserta didik dalam menuntut ilmu dengan berbagai kegiatannya di sekolah.

Kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain di SMA Negeri 1 Ulubelu yang bertujuan mengembangkan potensi individu setiap peserta didik telah dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, baik dalam pengembangan potensi peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Meski terletak di lingkungan desa potensi dan keterampilan peserta didikdi SMA Negeri 1 Ulubelu tidak berbeda dengan peserta didik yang lain. Terbukti dengan keikutsertaan aktif peserta didik dari sekolah ini dalam berbagai kegiatan organisasi maupun perlombaan-perlombaan antar sekolah baik tingkat wilayah kabupaten maupun provinsi.

Situasi dan kondisi sekolah bukanlah penghalang dalam membangun suasana demokratis dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Tetapi dapat menciptakan semangat dalam belajar dan memahami pola kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peserta didik. Namun ternyata membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi. Jadi demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara dan lainnya.Demokrasi yang sebenarnya memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya, dimana masyarakat memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik, perlu praktik internalisasi melalui PKn.

Internalisasi adalah sebuah proses menyatunya nilai dalam diri seseorang, merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, perilaku(tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri seseorang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini akan bersifat permanen dalam diri seseorang. Proses internalisasi menurut Winarno (2009) dalam (Widyaningsih,dkk 2014:182) dapat terjadi melalui beberapa tahap,sebagai berikut:

- a. Tahap Transformasi Nilai, dimana dalam tahap ini pendidik sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa yang semata-mata komunikasi searah.
- b. Transaksi Nilai yakni suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik secara aktif. Dalam tahap ini pendidik tidak hanya memberikan informasi tentang nilai-nilai tetapi juga terlibat dalam proses menerima dan melaksana-kan nilai-nilai itu, dan
- c. Tahap Internalisasi, pada tahap ini jauh lebih dalam yang juga melibatkan tidak hanya aspek fisik, tetapi telah menyangkut sikap mental kepribadian baik bagi pendidik maupun peserta didiknya.

Mengingat pentingnya menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk warga Negara yang demokratis, maka peranan PPKn dalam mewujudkan tujuan tersebut sangatlah penting, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian "Peranan Pembelajaran PPKn dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu Tanggamus Tahun Pelajaran 2017/2018".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peranan Pembelajaran PPKndalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu dengan sub fokus penelitian sebagai berikut:

- 1. Peranan PPKn dalam transformasi nilai-nilai demokrasi
- 2. Peranan PPKn dalam transaksi nilai-nilai demokrasi
- Peranan PPKn dalam internalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri Ulubelu

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, secara umum masalah penelitian ini adalah bagaimanakah peranan pembelajaran PPKndalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi. Secara khusus masalah penelitian ini adalah :

- Bagaimanakah peranan PPKn dalam transformasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu
- Bagaimanakah peranan PPKn dalam transaksi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu

 Bagaimanakah peranan PPKn dalam internalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peranan pembelajaran PPKndalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu, khususnya nilai kebebasan, nilai kesetaraan, rasa percaya dan kerjasama.

1. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya PPKn yang mengkaji nilai-nilai demokrasi.

b. Kegunaan Secara Praktis

1) Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi setiap tenaga kependidikan khususnya guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran agar bermakna dan berguna bagi setiap kehidupan peserta didik terutama dalam mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi.

2) Siswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi siswa dalam menerima dan mengolah informasi untuk dapat diinternalisasikan ke dalam dirinya sebagai sebuah nilai yang utuh.

3) Peneliti

Sebagai calon guru hasil penelitian ini dapat dijadikan suplemen materi dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, dengan wilayah kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), karena bertujuan untuk membentuk warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pentingnya upaya memahami nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan di masyarakat

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah peranan pembelajaran PPKndalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI dan guru PPKn,di SMA Negeri 1 Ulubelu

4. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dari tanggal 13 November 2017 sampai dengan 02 April 2018

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pengertian PPKn

Dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 dicantumkan bahwa "mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dankewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarekter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945". Proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarahkan pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia, yang menetapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada dasarnya pembelajaran tersebut meliputi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Perbedaan PKN (N) dan PKn (n) dapat dilihat dari pemaparan para ahli berikut ini, Soemantri dalam Rusminiyati, (2007: 25) PKN merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau membina warga Negara yang baik, yaitu warga Negara yang tahu, mau dan mampu berbuat baik.

Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan *civic education* atau *civics* mempunyai banyak pengertian dan istilah.Muhammad Numan Somantri

dalam mengartikan civics sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik), dan hubungan individu-individu dengan negara. Sebelumnya Henry Randall Waite (1886) sebagaimana dikutip oleh Ubaedillah (2006: 5) merumuskan pengertian civics sebagai berikut: "The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state" (ilmu pengetahuan kewarganegaraan, hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, hubungan seseorang individu dengan negara).

Pengertian yang disebutkan Randall sejalan dengan penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu " Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrument, dan praksis pendidikan yang utuh dalam menumbuhkan pengetahuan, sikap dan keterampilan berwarga negara bagi peserta didik.

Istilah lain yang hampir identik dengan *civics* adalah *citizenship*.

Citizenship education atau education for citizenship menurut Cogan

(1999) dalam (Winataputra dan Budimansyah 2007: 10)diartikan sebagai istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar

sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *citizenship education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan.

Sampai saat ini menjadi bagian penting dalam pendidikan nasional yang dikategorikan dalam lima status, yaitu sebagai mata pelajaran di sekolah, matakuliah di perguruan tinggi, cabang disiplin ilmu pendidikan sosial dalam kerangka program pendidikan guru, program pendidikan politik dan sebagai kerangka konseptual landasan berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status-status sebelumnya.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di Indonesia yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang di kenal dengan Mata Pelajaran *Civics* di Sekolah, meskipun sampai dengan 1975 masih terdapat kerancuan dan ketidakajekan dalam konseptualisasi *civivs*, pendidikan kewargaan negara dan pendidikan IPS. Krisis yang bersifat konseptual tersebut menurut Kuhn 1970 tercermin dalam konsep seperti : *civics* tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinisasi politik; *civics* tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan social; PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN tahun 1973 diidentikan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 yang

tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan PKN 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang berintisari Pancasila dan P4.

Setelah jatuhnya sistem politik orde baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih dinamis, cara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) baru adalah pembelajaran nilai dan prinsip demokrasi melalui proses pembelajaran yang kolaboratif dan demokratis. Maka muncul pendapat baru tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Zamroni (2003) dalam Tukiran Taniredja (2013:2) yaitu:

"Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat agar mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kepada generasi muda tentang demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyrakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilainilai demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembetukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 agar dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang demokratis.

Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar hukum yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara imperatif, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Salah satu misi nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan dengan koridor " *value-based education*". Kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma berikut (Wiranata& Budimansyah, 2007:86):

- a. PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan tanggung jawab.
- b. PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks subtansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
- c. PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (contens embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai pembelajaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Sehingga dalam menyusun program pendidikan kewarganegaraan harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar tersebut yang akan dapat membantu peserta didik untuk mengetahui, memahami dan mengapresiasikan citacita nasional; serta dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai masalah pribadi, masyarakat dan negara.

b. Fungsi PPKn

Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.Pendidikan kewarganegaraan sebagai usaha yang dilakukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia merupakan salah satu bentuk yang paling tepat guna menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkarakter berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan cita-cita nasional yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahannya khususnya alinea keempat yang menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, Depdiknas (2006) menyatakan bahwa fungsi dari mata pelejaran Pkn adalah : sebagai wahana yang membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*), cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanah pancasila dan UUD 1945. Dalam hal menginternalisasi nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran PPKn di sekolah secara sistematis telah diatur dalam kurikulum pembelajaran PPKn. Di SMA Negeri 1 Ulubelu masih menggunakan KTSP dengan SK dan KD pembelajaran sebagai berikut :

Kelas XI Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Menganalisis budaya	2.1 Mendeskripsikan pengertian
demokrasi menuju	dan prinsip-prinsip budaya
masayarakat madani	demokrasi
•	2.2 Mengidentifikasi cirri-ciri
	masyarakat madani
	2.3 Menganalisis pelaksanaan
	demokrasi di Indonesia sejak
	orde lama, orde baru, dan
	reformasi
	2.4 Menampilkan perilaku
	budaya demokrasi dalam
	kehidupan sehari-hari

Tabel 2.1 SK dan KD Pembelajaran PPKn

Menurut Numan Sumantri (2001), fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah "Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari".

Sejalan dengan misi dan tujuannya, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan warga negara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina tanggung jawab warganegara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warganegara (civic participation).

Mengingat banyak permasalahan mengenai pelaksanaan PKn sampai saat ini, maka arah baru PKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai arah baru Dikti (2016) yaitu :

- a. PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya, yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warganegara. Kemampuan dasar terkait dengan kemampuan intelektual, sosial (berpikir,bersikap, bertindak, serta berpartisi-pasi dalam hidup bermasyarakat). Substansi pendidikan (cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi) dijadikan materi kurikulum PKn yang bersumber pada pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia.
- b. PKn mengembangkan daya nalar (*state of mind*) bagi para peserta didik. Pembangunan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggungjawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi.
- c. PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan pertisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran.
- d. kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui "mengajar demokrasi" (*teaching democraty*), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democray*).

Dari arah baru PKn yang diharapkan terealialisasikan dalam kehidupan nyata di sekolah maupun di masyarakat , yang terbentang ke seluruh Tanah Air. Selain itu juga akan terbangun budaya demokrasi, yang menjadi esensi materi pembelajaran yang perlu disampaikan oleh guru.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah wahana mencerdaskan bangsa dengan upaya menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tujuan PPKn

Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Depdiknas (2006) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) Berpatisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (d) Berinteraksi dengan bangsabangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan tejnologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali siswa agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Pendidikan kewarganegaraan juga membekali siswa memiliki kemampuan untuk dapat berkembang secara positif dan demokratis.Sikap demokratis yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah sikap yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Menurut pendapat *The National Curriculum Council* (Edwards and Fogelman, 2000) dalam (Bunyamin Maftuh,2008:138), Pendidikan Kewarganegaraan (*Education for Citizenship*) bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggali, membuat keputusan yang berpengetahuan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Ubaedillah (2015: 18) pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain: (a) membentuk kecakapan partisipatif warga Negara yang bermutu dan bertanggung jawab; (b) menjadikan warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis yang berkomitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; dan (c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.

d. Pentingnya Peran PPKn

Pentingnya peran pendidikan kewaganegaraan dalam pembudayaan dan pemerdayaan sepanjang hayat melalui nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya dalam lingkungan sekolah.Paradigma pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan penting dilakukan sebab peserta didik merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Pancasila yang menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan dan penyelenggaran pemerintahan dalam urusan Negara senantiasa harus mencerminkan nilainilai pancasila.Pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan mengajarkan dan mendidik peserta didik untuk mengetahui dan memahami urusan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.Oleh sebab itu sekolah khususnya kelas hendaknya menggambarkan demokrasi sederhana sebagai cerminan negara Indonesia yang berdemokrasi.

Proses demokratisasi yang dialami bangsa Indonesia saat ini belum ditunjang oleh proses pendidikan untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis. Padahal demokrasi tidak dapat terlaksana secara alamiah tanpa ditunjang oleh proses pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis untuk menegakkan dan mengembangkan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu proses pendidikan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan demokratisasi. Menurut John. J. Patrick konsep pendidikan

kewarganegaraan (*civic education*) yang efektif untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis mencakup empat komponen dasar sebagai berikut (Bahmuller & Patrick, 1999):

- 1. Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi. Melalui komponen pertama ini diajarkan konsep-konsep dan implementasi demokrasi yang mencakup konsep demokrasi (minimal), konstitusionalisme, hak-hak warganegara, kewarganegaraan, civil society (masyarakat madani) dan ekonomi pasar,
- 2. Keterampilan kognitif warganegara yang demokratis (*cognitive skills*) yang ditujukan agar dapat memberdayakan warganegara supaya memiliki kemampuan mengidentifikasikan, mendiskripsikan, menjelaskan informasi dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah publik dan menentukan dan mempertahankan keputusan tentang masalah-masalah tersebut.
- 3. Keterampilan partisipatori warganegara yang demokratis dimaksudkan untuk dapat memberdayakan warganegara agar mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik dan memiliki tanggungjawab terhadap wakil-wakilnya di pemerintahan. Kombinasi keterampilan kognitif dan keterampilan partisipastori dapat dijadikan sarana bagi warganegara berpartisipasi secara efektif untuk memajukan kepentingan umum dan personal serta mempertahankan hak-hak mereka. Pengembangan keterampilan kognitif dan partisipatori membutuhkan agar siswa belajar secara intelektual di dalam maupun diluar kelas.
- 4. Kebaikan dan disposisi warganegara demokratis yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dan disposisi terhadap demokrasi. Komponen ini menunjukkan sifat atau karakter yang diperlukan untuk mendukung dan mengembangkan demokrasi.

2. Tinjauan tentang Internalisasi

a. Pengertian Internalisasi

Secara etimologis internalisasi menunjukan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai proses penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga menjadi keyakinan dan

kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2017).

Istilah internalisasi yang dalam bahasa Inggris "internalization" diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian (Chaplin, 2005). Pendapat ini menyatakan bahwa dalam menerima sebuah informasi atau pengetahuan seseorang bukan hanya akan memahaminya sebagai sebuah pengetahuan saja melainkan di masukan dalam pemahaman yang dituangkan dalam bentuk perilaku. Internalisasi memiliki arti lain menurut Mulyana (2004:21)internalisasi adalah menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, perilaku (tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri seseorang Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini akan bersifat permanen dalam diri seseorang.

Sedangkan Ihsan (1997:89) memaknai internalisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai kedalam jiwa sehingga menjadi miliknya. Proses yang dilalui seseorang merupakan proses yang terjadi didalam internal dirinya sehingga apa yang ia pahami dan ia lakukan adalah perilaku yang nampak pada diri individu tersebut hingga bisa dikatakan perilakunya, ini berbeda pada setiap individu. Pengertian lain diungkapakan oleh Sujatmiko (2014:35) mengartikan internalisasi sebagai proses panjang yang dilakukan oleh individu dilahir-kan sampai

ia meninggal. Proses tersebut berupa penyerapan nilai dan <u>norma</u> individu kepada masyarakat. Pendapat ini mengatakan bahwa proses internalisasi ini dilakukan oleh individu dalam dirinya tanpa ada yang tahu kapan ia memulai dan mengakhiri proses ini, karena proses ini terjadi sejalan dengan kodrat manusia yang selalu ingin tahu terhadap hal-hal yang dianggap baru baginya.

Berdasarkan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa internalisasi atau *internalization* merupakan sebuah proses yang dilakukan individu sebagai makhluk yang selalu ingin tahu mengenai halhal yang sudah diketahui maupun belum diketahui dalam dirinya sebagai pengetahuan yang diolah menjadi dasar berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

b. Tahapan Internalisasi

Proses internalisasi dalam pembentukan sikap/ nilai berdasarkan hasil penelitian Winarno (2009) dalam Titik Sunarti,dkk (2014:182) pada dasarnya mencakup tiga tahapan

- a) Tahap Transformasi Nilai, dimana dalam tahap ini pendidik sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa yang semata-mata komunikasi searah.
- b) Transaksi Nilai yakni suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik secara aktif. Dalam tahap ini pendidik tidak hanya memberikan informasi tentang nilai-nilai tetapi juga terlibat dalam proses menerima dan melaksana-kan nilai-nilai itu, dan
- c) Tahap Internalisasi, pada tahap ini jauh lebih dalam yang juga melibatkan tidak hanya aspek fisik, tetapi telah menyangkut sikap mental kepribadian baik bagi pendidik maupun peserta didiknya.

Proses internalisasi ini terjadi juga berlangsung seiring dengan perkembangan seseorang, proses ini harus didampingi oleh orang yang telah lebih dulu tahu dari pada seseorang yang baru akan menginternalisasikan dalam diri dengan bimbingan orang yang lebih pakar di bidangnya maka proses ini akan bermakna dalam kehidupan seseorang. Internalisasi merupakan usaha yang dilakukan untuk membagikan pengetahuan kepada orang lain melalui berbagai pendekatan antar orang maupun kelompok.

c. Teori Internalisasi

Psikoanalisa dan teori belajar sosial, menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana seorang anak menjadi manusia yang bermoral atau memiliki nilai. Kedua teori ini menawarkan sebuah konsep internalisasi, yakni; "the adoption of pre-existing, ready-made standards for right actions as one's own" (Berk, 1994) dalam Bunyamin Maftuh (2008):

- a. Teori Psikoanalisa, sebagai seorang tokoh psikoanalisa Sigmun Freud meyakini bahwa anak-anak memperoleh nilai atau moralitas mereka langsung dari orang tuanya, dan mereka bertindak sejalan dengan resep-resep moral untuk menghindari perasaan bersalah.
- b. Teori belajar sosial (*social learning theory*) menyatakan, bahwa anak-anak memperoleh nilai atau perilaku bermoral melalui pencontohan dan penguatan (*reinforcement*). Pendukung teori ini mengakui, bahwa anak-anak mulai berperilaku dalam cara-cara yang konsisten dengan standar orang dewasa karena para orang tua dan guru menindaklanjuti "perilaku yang baik" dengan penguatan positif dalam bentuk persetujuan, kasih sayang (afeksi), dan hadiah lainnya (Berk, 1994). Mereka meyakini bahwa anakanak belajar untuk berperilaku moral secara luas melalui pencontohan (*modeling*), dengan mengamati dan meniru orang dewasa yang melakukan perilaku yang pantas.

Teori belajar sosial dan teori psikoanalisa merujuk, terutama pada pewarisan norma moral dan nilai dari masyarakat kepada anak. Orientasi internal mereka mencerminkan internalisasi norma dan nilai tersebut Gibbs (1991). Dengan kata lain teori ini menjelaskan bahwa menginternalisasi nilai dari perspektif sosialisasi.

d. Tujuan Internalisasi

Metode internalisasi, menurut A. Tafsir (2012), memiliki tiga tujuan.Ketiga tujuan dimaksud adalah pencapain aspek *knowing*, *doing* dan *being*. Pertama, aspek mengetahui (*knowing*). Tugas guru pada aspek ini adalah mengupayakan agar peserta didik mengetahui suatu konsep. Guru akan memberikan informasi kepada peserta didik tentang apa yang harus diketahui dan dipelajari. Guru bisa menggunakan berbagai metode, seperti : diskusi, tanya jawab dan penugasan. Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai apa yang telah diajarkan, guru melakukan ujian atau memberikan tugas-tugas rumah. Jika nilainya bagus maka berarti aspek ini telah berhasil dicapai.

Kedua, aspek melaksanakan (*doing*). Pada aspek ini guru akan melihat kemampuan peserta didik dalam mengerjakan atau mampu melaksanaan apa yang telah mereka ketahui. Guru dapat menggunakan metode demonstrasi atau bermain peran untuk mencapai tujuan aspek ini. Setelah didemontrasikan oleh guru atau melalui tayangan film dan sebagainya, peserta didik secara bergantian dapat mempraktikkan seperti apa yang telah dilihat dibawah bimbingan guru. Untuk melihat

tingkat keberhasilannya guru dapat mengadakan ujian praktik.Dari ujian tersebut dapat dilihat siswa telah mampu melakukan dengan benar atau belum.

Ketiga, aspek menjadi kepribadian (being). Aspek ini seharusnya tidak sekedar pada nilai karakter menjadi milik peserta didik, tetapi nilai karakter tersebut menjadi satu dengan kepribadian peserta didik. Peserta didik melaksanakan apa yang telah diketahui dan dilakukan secara terus-menerus. Ketika peserta didik telah memahami dan menjadikannya sebagai kepribadian dalam dirinya maka mereka akan bersungguh-sungguh menjalankannya tanpa ada paksaan dari dalam maupun luar dirinya. Proses penilaian pada aspek ini lebih sulit dari pada aspek-aspek sebelumnya, karena tidak dapat diukur dengan cara yang diterapkan sebelumnya. Aspek ini lebih menekankan pada kesadaran peserta didik dalam mengamalkannya. Kesadaran seseorang dalam melakukan suatu tindakan akan muncul tatkala tindakan tersebut telah dihayati (terinternalisasi) dalam diri.

3. Tinjauan tentang Nilai-Nilai Demokrasi

a. Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai merupakan hal tidak asing lagi didengar khususnya dalam lingkup pendidikan.Nilai seringkali dijadikan sebagai sebuah ukuran dari keberhasilan suatu pembelajaran.Hal ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang dalam pendidikan tidak memahami arti dari nilai itu sendiri.Nilai merupakan sesuatu yang sangat dekat dalam kehidupan baik

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan demikian nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan, kepercayaan yang bersumber dari berbagai sistem nilai. Oleh karena itu nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia (Syahrial Syarbaini:2010).

Adapun pengertian definisi nilai menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Mulyana "nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan". Sedangkan menurut Richard Merril dalam Zubaedi (2011) " nilai adalah patokan atau standar pola-pola pilihan yang dapat membimbing seseorang atau kelompok kearah *satisfaction*, *fulfillment*, and meaning. Menurut Sandin, patokan atau kriteria ini memberi dasar pertimbangan kritis tentang pengertian religious, estetika, dan kewajiban moral.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sekumpulan pengetahuan yang bermakna dihimpun sebagai pedoman dalam kehidupan untuk dapat menentukan baik buruknya sesuatu.Nilai ada dalam jiwa manusia baik berupa penerimaan maupun tindak laku seseorang.Dari pendapat ini mengatakan bahwa nilai merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari dua kata *demos* (rakyat)dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan

dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sejarahnya demokrasi sering disamakan dengan kebebasan (*freedom*). Sebenarnya demokrasi dan kebebasan tidaklah sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Ubaedillah (2015:82) demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat demokrasi merupakan bentuk institusional dari kebebasan (*institutionalization of freedom*).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yosefh A.Schmer dalam Benny Kurniawan (2012:29).bahwa "demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat". Demokrasi merupakan sesuatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, demokrasi dipandang penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (*good society and good government*).

Kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat, demokrasi dianggap sebagai *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan masyarakat mentransformasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dengan catatan tentu saja bahwa tidak setiap masyarakat demokratis memiliki semua nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing.Nilai-nilai demokrasi memang sangat menghargai martabat manusia, namun pilihan apakah demokrasi liberal atau demokrasi yang lain ini tidak dapat lepas dari konteks masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai demokrasi menurut Cipto, et al. (2002) dalam Tukiran Tuniredja (2013:140-145) meliputi :

a. Kebebasan menyatakan pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak sebagai warga Negara yang dijamin undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi.Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga Negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Dalam rangka pembangunan negara, warga Negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

b. Kebebasan berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga Negara.Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari sebagai makhluk sosial.Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok termasuk membentuk organisasi politik dan sebagainya.Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah.Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan sehat bagi warga negara.

c. Kebebasan berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada empat jenis partisipasi. Pertama, pemberian suara dalam pemilihan umum. Kedua, bentuk partisipasi dengan melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah. Ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah dengan tidak untuk menciptakan gangguan bagi kehidupan politik. Keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku.

d. Kesetaraan antarwarga

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan diartikan sebagai adanya kesempatanyang sama bagi setiap warga Negara tanpa membedakan etnis, bahasa,

daerah maupun agama. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat terutama bagi masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia.

Prinsip kesetaraan ini memberi ruang bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan diperlakukan sama di depan hukum tanpa terkecuali.

e. Rasa percaya (*Trust*)

Rasa percaya antar satu sama lain baik antar warga, antar politisi maupun warga dan politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Pemerintahan yang demokratis akan sulit terbentuk apabila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Dimulai dengan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri maka akan dapat menimbulkan kepercayaan pada orang lain.

f. Kerja sama

Kerja sama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama dalam hal kebajikan, bukan dalam hal keburukan. Dalam sebuah kerja sama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antarkelompok. Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerja sama antarindividu dan kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerja sama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi.

Pendapat lain diungkapkan oleh Henry B. Mayo yang mengutarakan nilai-nilai demokrasi sebagai berikut : menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela; menjamin terjadinya perubahan secara damai; pergantian penguasa dengan teratur; penggunaan paksaan sedikit mungkin; pengakuan terhadap nilai keanekaragaman; menegakkan keadilan; dan memajukan ilmu pengetahuan. Apabila nilai-nilai demokrasi ini telah tertanam dalam diri warga Negara maka dapat terwujudlah kultur demokrasi yang membudaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidik atau guru senantiasa harus melaksanakan pembelajaran yang mampu mencerahkan dan membangkitkan keingintahuan dan semangar peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dan mengembangkan kebebasan yang mereka miliki. Disamping itu guru juga harus mampu membangkitkan kesadaran para peserta didik akan masa depan yang harus mereka ciptakan sendiri. Membekali peserta didik dengan nilai moralitas dan spiritualitas wajid dilakukan sebagai bekal mereka dalam menciptakan masa depannya. Untuk itu sekolah mestinya harus memiliki kultur penanaman moralitas dan spiritualitas, yang memungkinkan dan memberikan kesempatan peserta didik memperoleh pengalaman kehidupan yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang berdampak besar dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik melalui pembelajaran guna menciptakan masyarakat yang demokratis.

C. Penelitian yang Relevan

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Bunyamin Maftuh (Tahun 2008 dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan) hasil penelitian tersebut menunjukkan PKn sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting, baik di tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi dalam membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. PKn diharapkan bukan sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik. PKn bukan sekadar melaksanakan tradisi transmisi nilai-nilai kewarganegaraan (citizenship transmission), tetapi lebih bersifat reflective inquiry yang berarti mendidik untuk berpikir kritis mengkaji dan memecahkan permasalahan kemasyarakatan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan penuh keyakinan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai-nilai, bedanya penulis memfokuskan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, sedangkan penelitian ini membahas peranan PKn dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi.
 - 2. Penelitian yang dilakukan oleh Udin Saripudin Winataputra
 Disertasi Tahun 2001 dengan judul "Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi (suatu kajian konseptual dalam konteks pendidikan IPS)". Hasil penelitian menunjukkan pendidikan kewarganegaraan yang berdiri sendiri dalam semua jenjang

pendidikan perlu dipertahankan dan dimantapkan. Hal ini diperlukan sebagai wahana "education about citizenship" yang memungkinkan peserta didik menguasai "civic knowledge" secara memadai sehingga memberi landasan yang kuat untuk melakukan proses "education through citizenship" yang diwujudkan dalam bentuk "civic participation" dan "civic responsibility" di lingkungan sekolah. Bersamaan dengan itu pula lingkungan sekolah perlu dikembangkan sebagai "laboratory for democracy". Keterpaduan kegiatan "curricular" mata pelajaran PKn yang berdiri sendiri dengan kegiatan "co-curricular" dan "extra curricular" dalam kehidupan sosio-kultural yang demokratis secara gradual akan memfasilitasi peserta didik untuk memasuki proses" education for citizenship", dimana mereka bukan hanya memiliki "civic intelligent" dan mampu menunjukkan "civic engagement" dengan "civic responsibility" dalam konteks kehidupan sekolah, tetapi juga mau dan mampu berkehidupan demokratis di lingkungan masyarakatnya kelak kemudian hari. Penelitian ini dirasa sangat relevan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, karena penelitian ini meneliti tentang peranan pendidikan kewarganegaraan.Namun penelitian ini berfokus pada jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi, sedangkan penulis berfokus pada peranan dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi di suatu sekolah.

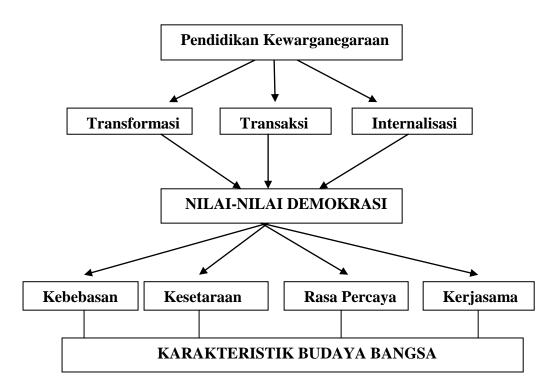
D. Kerangka Pikir

Peranan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam rangka menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional.Sebagaimana diungkapkan oleh Zamroni Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, dan kesadaran bahwa demokrasi merupakan bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.Untuk dapat menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara peserta didik dapat diwujudkan melalui praktik internalisasi melalui PKn.

Internalisasi adalah sebuah proses menyatunya nilai dalam diri seseorang, merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, perilaku(tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri seseorang. Proses internalisasi dapat terjadi melalui beberapa tahap, menurut Winarno dalam Titik Sunarti,dkk (2014:182)sebagai berikut:

- a. Tahap Transformasi Nilai, dimana dalam tahap ini pendidik sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa yang semata-mata komunikasi searah.
- b. Transaksi Nilai yakni suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik secara aktif. Dalam tahap ini pendidik tidak hanya memberikan informasi tentang nilai-nilai tetapi juga terlibat dalam proses menerima dan melaksana-kan nilai-nilai itu, dan
- c. Tahap Internalisasi, pada tahap ini jauh lebih dalam yang juga melibatkan tidak hanya aspek fisik, tetapi telah menyangkut sikap mental kepribadian baik bagi pendidik maupun peserta didiknya.

Setelah melalui tahap internalisasi ini peserta didik diharapkan telah memiliki kesadaran bahwa kelangsungan demokrasi tergantung pada bagaimana mereka mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai demokrasi tersebut meliputi: Kebebasan (menyatakan pendapat, berkelompok, berpartisipasi), Kesetaraan, Rasa percaya dan kerjasama. Dimana nilai-nilai tersebut merupakan karakter budaya bangsa Indonesia.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data yang benar dan terpercaya tentang peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moelong (Herdiansyah Haris 2012:9), " penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya."

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah Peranan Pembelajaran PPKn dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan humant instrument.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang mendukung peranan pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Ulubelu. Pentingnya peran pendidikan kewaganegaraan dalam pembudayaan dan pemerdayaan sepanjang hayat melalui nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya dalam lingkungan sekolah. Paradigma pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan penting dilakukan sebab peserta didik merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peranan PKn

dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dapat dilihat melalui tahap transformasi nilai, transaksi nilai dan internalisasi nilai.

Dalam hal ini data yang diperlukan ialah hasil wawancara terhadap guru PPKn, peserta didik dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mengenai peranan pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, dokumentasi hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKn khususnya pada materi yang berkaitan dengan demokrasi, serta hasil pengamatan langsung terhadap sikap dan prilaku peserta didik di sekolah berdasarkan indikator nilai-nilai demokrasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik snowboling sampling. Menurut Arikunto (2009:16), "snowboling sampling merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan." Informan dalam penelitian ini adalah guru, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan perwakilan peserta didik kelas XI yang berjumlah 3 orang dipilih secara acak.

No.	Data	Melalui	Subjek
1.	Transformasi Nilai	Dokumentasi	Guru, peserta
		hasil belajar	didik dan wakil
		peserta didik	kepala sekolah
		dan wawancara	bidang
			kesiswaan
2.	Transaksi Nilai	Wawancara	Guru PKn dan
		dan observasi	peserta didik
3.	Internalisasi Nilai	Observasi dan	Guru, peserta
		wawancara	didik dan wakil
			kepala sekolah
			bidang
			kesiswaan

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmah banyak cara yang dipakai untuk pengumpulan data.

Adapaun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi merupakan pengamatan yang merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengam jalan mengadakan pengamatan terhadap beberapa kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Ulubelu yang sedang berlangsung, maupun sikap dan perilaku peserta didik diluar jam pelajaran. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Metode ini penulis gunakan untuk mengukur hasil proses internalisasi nilai-nilai demokrasi pada peserta didik, melalui sikap dan perilaku yang tampak dengan melihat indikator nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, rasa percaya dan kerjasama. Adapun pelaksanaannya dengan interview bebas terpimpin, karena akan memberi kebebasan pada pihak yang akan diteliti dalam memberikan jawaban sehingga akan memperoleh data yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data yang didapatkan dari dokumen mengenai hal-hal yang mendukung dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang tertulis dari SMA Negeri 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus, sehingga peneliti bisa mendapatkan data-data yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Teknik	Data	Informan
1	Observasi	 Proses pembelajaran PKn Sikap dan perilaku peserta didik di lingkungan sekolah 	1. Guru 2. Peserta didik
2	Wawancara	 Guru dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi Peserta didik dalam menerima dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam pengawasan terhadap sikap dan perilaku peserta didik 	 Guru Peserta didik Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
3	Dokumentsi	 Hasil belajar peserta didik Catatan kasus peserta didik 	1. Guru PKn 2. Guru BK
		3. Jumlah seluruh peserta didik	3. Staf TU

Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data

F. Uji Kredibilitas Data

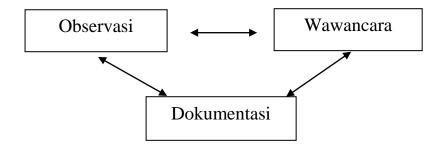
Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. dengan demikian, peneliti dapat dimudahkan dalam mendapat informasi dan data.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautetikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber d ata yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzi

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah menulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode.

3. Intepretasi Data

Tahap intepretasi data yanitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk diberi maknanya yang lebih

luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

H. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data peneliyi menggunakan teknik Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman (2003:23). Kegiatan analisis data pada model ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

3. Penyajian Data (Data Display)

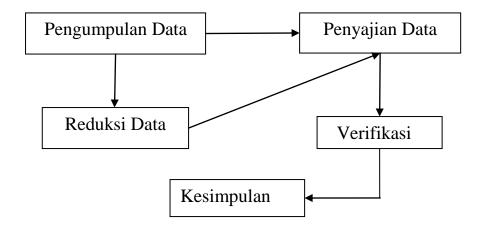
Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

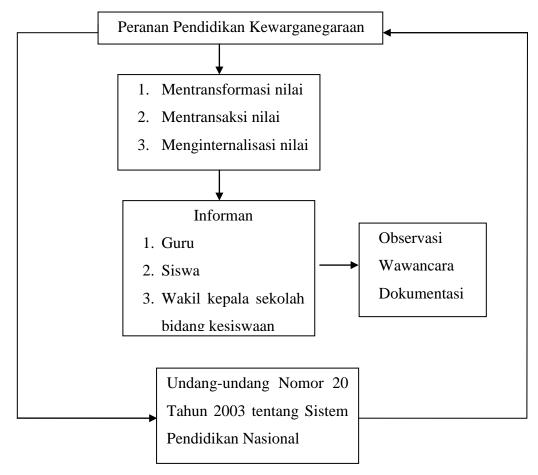
Teknis analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

I. Rencana Penelitian

Berikut juga disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan yang akan dilakukan peneliti dengan teknik analisis yang telah dijelaskan.



Gambar 3.3 Rencana Penelitian

J. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Persiapan Pengajuan Judul

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini peneliti mengajukan judul yang terdiri dari dua alternative pilihan kepada dosen pembimbing akademik.

Setelah salah satu judul mendapat persetujuan, selanjutnya peneliti

mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 16 Oktober 2017.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat persetujuan judul dari Ketua Program Studi PPKn, peneliti melakukan penelitian pendahuluan setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung dengan No. 8861/UN26.13/PN.01.00/2017. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan di SMA Negeri 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Ulubelu untuk mengetahui proses pembelajaran PPKn di sekolah tersebut. Peneliti memperoleh data hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKn. Data yang diperoleh tersebut kemudian menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian. penelitian ini ditunjang dengan beberapa literature dan arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 16 Januari 2018 disetujui oleh Pembimbing 1 untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapat persetujuan setelah dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari Pembimbing I dan II maka

seminar proposal dilakukan pada tanggal 05 Februari 2018. Langka selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn dan kordinator seminar.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan instrument penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi penelitin. Kisi-kisi dan instrument tersebut akan menjadi pedoman peneliti dalam menggali informasi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrument penelitian:

- a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian, yaitu peranan pembelajaran PPKn dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu dengan sub fokus penelitian peranan PPKn dalam transformasi nilai-nilai demokrasi, peranan PPKn dalam transaksi nilai-nilai demokrasi dan peranan PPKn dalam internalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu.
- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian, yaitu tentang peranan pembelajaran PPKn dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi seperti nilai kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antarwarga, rasa percaya dan kerja sama.
- c. Penyusunan pertanyaan wawancara dengan informan penelitian dan membuat klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan.

d. Setelah kisi-kisi dan instruneb wawancara, observasi dan dokumentasi disetujui oleh dosen pembimbing I dan II, maka peneliti siap melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapat izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung dengan No. 1820/UN26.13/PN.01.00/2018 yang kemudian diajukan kepada Kepala SMA Negeri 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus agar diberi persetujuan melakukan penelitian di sekolah tersebut. Setelah kurang lebih satu bulan penelitian berlangsung peneliti memperoleh data dan informasi dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan kemudian didokumentasikan. Berikut jadwal wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian.

Tabel 4.1 Jadwal Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Penelitian Di SMA Negeri 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus

No.	Tanggal	Teknik Pengumpulan Data	Informan
	Penelitian		
1.	16/03/2018	Wawancara, observasi	Gr PPKn 1,
			Gr PPKn 2
2.	19/03/2018	Wawancara, observasi	Gr PPKn 1
3.	20/03/2018	Wawancara, observasi	Gr PPKn 2
4.	23/03/2018	Wawancara, observasi	Gr PPKn 1,
			Gr PPKn 2
5.	02/04/2018	Wawancara, observasi, dokumentasi	Gr PPKn 1,
			Gr PPKn 2
6.	19/03/2018	Wawancara, observasi, dokumentasi	PD 1,2,3,4,5
<i>7</i> .	23/03/2018	Wawancara, observasi, dokumentasi	PD 1,2,3,4,5
8.	27/03/2018	Wawancara, observasi, dokumentasi	PD 1,2,3,4,5
9.	19/03/2018	Wawancara, observasi, dokumentasi	WaKa
10.	23/03/2018	Wawancara, observasi, dokumentasi	WaKa
11.	02/04/2018	Wawancara, observasi, dokumentasi	WaKa

Sumber: Analisis Jadwal Pelaksanaan Penelitian, Instrumen Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat didokumentasikan. Data tersebut dalam bentuk berkas/file, rekaman suara, catatan pribadi dan foto. Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dari informan-informan tersebut kemudian dianalisis dan beberapa data dari sekolah kemudian dilampirkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai Peranan Pembelajaran PPKn dalam menginternalisasi Nilai-Nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peranan Pembelajaran PPKn dalam transformasi nilai-nilai demokrasi adalah menyampaikan informasi pada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas melalui metode ceramah atau penugasan sehingga peserta didik mencari sendiri secara langsung untuk menambah pengetahuan.
- b. Peranan Pembelajaran PPKn dalam transaksi nilai-nilai demokrasi cukup berhasil. Kegiatan-kegiatan di kelas telah melibatkan peserta didik secara aktif sehingga adanya hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Suasana kelas menjadi lebih demokratis karena suara-suara pendapat peserta didik baik bertanya maupun diskusi. Dengan adanya interaksi tersebut berdampak positif pada kepercayaan diri peserta didik dalam mengemukakan pendapat dan mengahargai orang lain.
- c. Peranan Pembelajaran PPKn dalam internalisasi nilai-nilai demokrasi cukup berhasil. Banyak nilai-nilai demokrasi yang telah terinternalisasi dengan baik dalam kepribadian peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini berdampak positif pada

kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai peserta didik maupun bagian dari warga masyarakat.

B. Saran

Setelah peneliti menyelesaikan, membahas, mengalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti ingin memberi saran kepada:

- a. Bagi guru mata pelajaran PPKn dalam upaya menginternalisasikan nilainilai demokrasi pada peserta didik hendaknya agar lebih kreatif dalam menciptakan suasana kelas yang demokratis agar peserta didik dapat belajar dengan aktif dan terbiasa berada dalam lingkungan yang aktif dan demokratis.
- b. Bagi peserta didik dalam proses pembelajaran hendaknya agar lebih serius dan konsentrasi agar dapat mendengarkan dengan baik dan mengahayati apa yang telah dipelajari.
- c. Bagi pihak sekolah dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah hendaknya menyiapkan sarana dan prasarana untuk memudahkan jalannya pembelajaran di kelas. Serta menyiapkan kegiatan-kegiatan yang positif bagi perkembangan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Lukis. 2016. *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perguruan Tinggi Umum Melalui Lembaga Dakwah Kampus*, Jurnal Pendidikan Islam.Vol.I No.2, Januari-Juni 2016
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- _____. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta:Rineka Cipta.
- Kurniawan, Benny. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Tangerang:Jelajah Nusa
- Marlina, Erni. 2016. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Rasa Cinta Tanah Air Pada Remaja Di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara), Jurnal Psikologi. Vol.4 No.4,hal. 849:856
- Maftuh, Bunyamin. 2008. *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.Vol.II No. 2 Juli 2008.
- Rohmat Mulyana. 2004. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta
- Syarbaini, Syahrial. 2010. *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito
- Sujatmiko, Eko. 2014. Kamus IPS. Surakarta :PT Aksara Sinergi Media.
- Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Penerbit Ombak
- Titik, Sunarti, dkk. 2014. *Internalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa SMP Dalam Perspektif Fenomenologis (Studi Kasus Di SMP 2 Bantul)*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi. Vol.2 No.2, 2014
- Ubaedillah. 2015. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di PerguruanTinggi. Jakarta:Sinar Grafika
- Winataputra, Udin S danDasimBudimansyah. 2007. *Civic Education*. Bandung: Program studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Yusuf, Muri. 2014. *MetodePenelitian:Kuantitaif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Prenadamedia Group
- Zamroni.2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta:Penerbit Ombak
- Zubaedi. 2011. Desain Pendidikan Karakter. Jakarta: Prenadamedia Group